



**PENGGUNAAN SURAT KABAR *SUARA MERDEKA* SEBAGAI
MEDIA KOMUNIKASI POLITIK PADA PEMILU 1999**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Karisma Aditya
NIM 13030111130024**

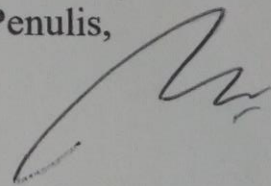
**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Karisma Aditya, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulisan lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 10 Januari 2019
Penulis,



Karisma Aditya
NIM 13030111130024

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO:

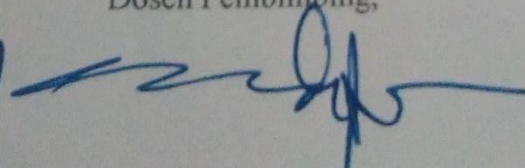
“Your goal life is to find out the people who need you the most, to find out the business that needs you the most, to find the project and the art that needs you the most. There is something out there just for you.”

-Naval Ravikant-

Dipersembahkan untuk:

Mama Murti (Alm.), Bapak Yuda
Dahyu Afni R, Wisnu Batara
dan yang akan membaca
Skripsi saya.

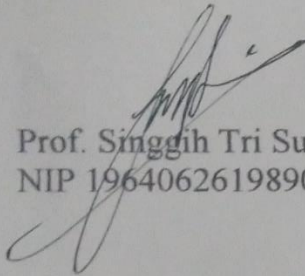
Disetujui,
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr. Indriyanto, S.H.,M.Hum.
NIP 196407111990011001

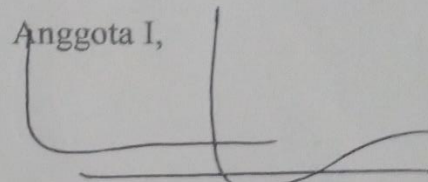
Skripsi dengan judul “Penggunaan Surat Kabar *Suara Merdeka* Sebagai Media Komunikasi Politik pada Pemilu 1999” yang disusun oleh Karisma Aditya (13030111130024) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada tanggal Januari 2019.

Ketua,



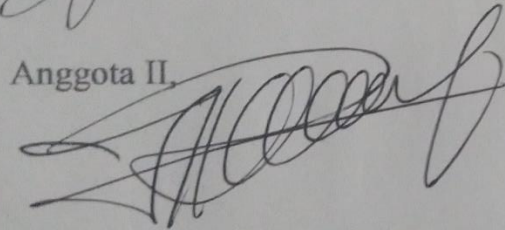
Prof. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum.
NIP 196406261989031003

Anggota I,



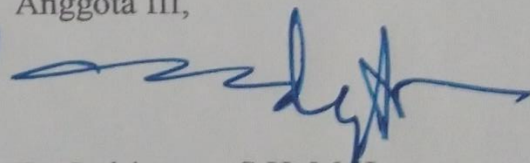
Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.
NIP 196808291994031001

Anggota II,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 196703191993031004

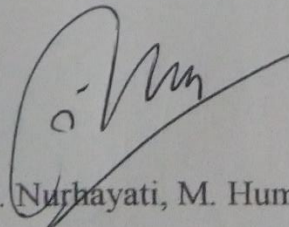
Anggota III,



Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407111990011001

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Nurhayati, M. Hum.
NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan kepada makhluk-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Surat Kabar *Suara Merdeka* Sebagai Media Komunikasi Politik pada Pemilu 1999” disusun sebagai persyaratan utama guna memperoleh gelar sarjana program strata-1 dalam Sejarah Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan ini banyak kesulitan yang penulis alami, baik dalam proses pengumpulan data di lapangan, wawancara dengan narasumber, maupun proses penulisan dari awal sampai akhir. Hal ini karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Dengan bantuan yang penulis terima dari banyak pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, petunjuk, dan semangat yang diberikan baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum. selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dr. Indriyanto, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran membaca tulisan saya yang saya sadari banyak kekurangan. Terima kasih telah mengajari saya mengenai cara penulisan dengan bahasa Indonesia yang benar, dan dengan sabar terus memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Dr. Haryono Rinardi, M.Hum selaku dosen wali saya dan Prof. Singgih Tri Sulistyono, M.Hum. selaku penguji dalam skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh penguji, pengajar dan seluruh keluarga besar Departemen Sejarah.

Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bakti Yudatama dan Almarhumah Sri Murtiningrum, yang telah memberikan dorongan dan kasih sayang kepada penulis, dan juga kakak, adik, keluarga, untuk Faiz, Dito, Mbak Keisya, Tante Vera, Budhe Naning, Eyang Esti, penulis ucapkan terima kasih. Kepada istri dan anak, Dahyu dan Batara yang sudah sangat banyak memberi semangat dan dukungan lain, juga untuk kedua mertua, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperguruan yang telah mendukung penulis, untuk Mas Armi (2010), Mas Petra (2006) dan senior lainnya, untuk Dinar, Rizal, Beni, Abi, Novi dan teman-teman satu angkatan lainnya, dan teman-teman di Departemen Sejarah. Penulis sangat berterima kasih kepada lembaga-lembaga dan perorangan yang sudah banyak membantu terutama untuk *Suara Merdeka*, PWI Jateng, dan KPU. Untuk Almarhum Agoes Dewa, Pak Amir Machmud, Pak Pulung, Pak Chip, Pak Joko, Pak Anas, Pak Adi, Mas Fadli dan narasumber lain yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai peneliti pemula, penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan pembelajaran serta bagi manusia-manusia yang haus akan ilmu pengetahuan.

Semarang, 10 Januari 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG MENJELANG PEMILU 1999	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	17
B. Kondisi Sosial Politik	
1. Partai Politik dalam Pemilu	19
2. Jumlah Pemilih dalam Pemilu	20
C. Media dan Kekuasaan	21
BAB III KOMUNIKASI POLITIK DALAM SURAT KABAR SUARA MERDEKA PADA AKHIR ORDE BARU	
A. Berita Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Pemilu	28
B. Penggunaan Berita Sebagai Media Komunikasi Politik	35

	C. Berita Turunnya Soeharto dan Munculnya Partai Baru	46
BAB IV	PENGGUNAAN SURAT KABAR SUARA MERDEKA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK PADA PEMILU 1999	
	A. Komunikasi Politik Awal Reformasi	52
	B. Berita Tentang Pemilihan Umum pada Masa Awal Reformasi	57
	C. Komunikasi Iklan Politik dalam Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i>	65
	1. Komunikasi Partai Politik	65
	2. Komunikasi Politik Lembaga Non-Parpol	72
	D. Berita tentang Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 1999	78
BAB V	SIMPULAN	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	DAFTAR INFORMAN	89

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
BPS	: Badan Pusat Statistik
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPC	: Dewan Perwakilan Cabang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Perwakilan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Kepmenpen	: Keputusan Menteri Penerangan
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
Kodya	: Kota Madya
Korwil	: Koordinator Wilayah
Korpri	: Korps Pegawai Republik Indonesia
Kosgoro	: Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
LUBER	: Langsung Umum Bebas Rahasia
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri

MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OPP	: Organisasi Peserta Pemilu
Pangab	: Panglima Angkatan Bersenjata
Parpol	: Partai Politik
Pantarlih	: Panitia Pendaftaran Pemilih
Panwalakpus	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pemilu	: Pemilihan Umum
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPSLN	: Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
PRPP	: Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
SIT	: Surat Izin Terbit
SIUPP	: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
SK	: Surat Keputusan
SOKSI	: Sentral Organisasi Seluruh Karyawan Indonesia
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SU	: Sidang Umum
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar

DAFTAR ISTILAH*

afiliasi	: masuk menjadi anggota, berbaur dan pertalian sebagai cabang.
beredel	: pencabutan / penutupan tentang pers.
<i>headline</i>	: informasi atau berita utama, penempatan di halaman muka.
krisis moneter	: krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara.
<i>mixing code</i>	: penggunaan unsur-unsur bahasa dari satu bahasa melalui ujaran khusus ke dalam bahasa lain.
<i>money politics</i>	: politik uang, uang ataupun barang yang diberikan untuk menyogok atau memengaruhi keputusan masyarakat agar memilih partai atau perorangan tersebut dalam Pemilu.
<i>non political issue</i>	: isu yang bukan dalam ranah politik.
Oplah	: jumlah barang cetakan yang diedarkan.
pers mandiri	: surat kabar yang berdiri sendiri, tidak terikat dengan partai politik atau organisasi massa lainnya.
<i>reshuffle</i>	: perombakan atau pergantian posisi seseorang dalam lingkungan politik atau kenegaraan.
sirkulasi	: jumlah barang cetakan surat kabar atau majalah yang dicetak oleh surat kabar atau majalah tersebut.
subsidi	: pemberian bantuan dari pemerintah..
stembus accord	: pengalihan suara dari partai yang tidak lolos ke partai yang lolos.

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam kamus dan dari berbagai buku.

DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
2.1	Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Tiap Kecamatan Tahun 1997 dan 1999	17
2.2	Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 1997 dan 1999	18
2.3	Jumlah Pemilih pada Pemilu 1997 dan 1999	21
3.1	Perolehan Kursi DPR Hasil Pemilu 1997	32
4.1	Perbandingan Situasi Komunikasi Masa Orde Baru dan Masa Reformasi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar:		Halaman
3.1	Berita tentang dimulainya pemilihan umum tahun 1997	30
3.2	Berita tentang jatah kursi DPR bagi ABRI	32
3.3	Rubrik Pemilu 1997 dalam surat kabar <i>Suara Merdeka</i>	36
3.4	Berita mengenai kampanye PDI dan Partai Golkar	37
3.5	Berita tentang Gubernur Jawa Tengah menghadiri kampanye PDI dan berita pelaksanaan kampanye PPP di Semarang	38
3.6	Berita mengenai kampanye PPP	39
3.7	Berita mengenai cara kampanye PPP dan PDI	40
3.8	Berita Partai Golkar yang menyampaikan visi misi dalam kampanyenya	41
3.9	Berita mengenai visi misi yang disampaikan PDI dan Partai Golkar dalam kampanyenya	42
3.10	Berita pidato Sudharmono saat kampanye Golkar di Semarang	43
3.11	Berita kedatangan Sekjen DPP Ary Mardjono sebagai juru kampanye	44
3.12	Berita “SPBU Diserbu, Ada yang “Ngangsu””	46
3.13	Berita mengenai aksi-aksi mahasiswa di Semarang	48
3.14	Berita penolakan mekanisme pengunduran Soeharto	49
3.15	Berita mengenai kondisi Kota Semarang setelah turunnya Soeharto	51
3.16	Berita mengenai aksi mahasiswa di Kota Semarang tentang kebebasan pers	51

4.1	Berita mengenai tanggal pelaksanaan Pemilu	58
4.2	Berita mengenai partai peserta Pemilu 1999	60
4.3	Pernyataan <i>Suara Merdeka</i> untuk memuat profil parpol peserta Pemilu yang ada di Jawa Tengah	61
4.4	Berita pelanggaran yang dilakukan oleh PPP dan PDI Perjuangan	62
4.5	Berita pelanggaran yang dilakukan oleh PBB, PAN dan PRD	63
4.6	Berita kriminal saat kampanye PDI Perjuangan dan PKB	65
4.7	Iklan kampanye Partai Golkar dengan menampilkan Ketua Umum Akbar Tandjung	67
4.8	Iklan politik berbentuk ucapan selamat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan ucapan Hari Kebangkitan Nasional DPD Tingkat I Jawa Tengah dari Partai Golongan Karya	67
4.9	Iklan politik Partai Golkar dalam rubrik keluarga <i>Suara Merdeka</i>	68
4.10	Iklan politik PDI Perjuangan dalam surat kabar <i>Suara Merdeka</i>	69
4.11	Iklan politik jaminan perlindungan bagi anggota PAN dari kecelakaan	70
4.12	Iklan kampanye PAN dalam surat kabar <i>Suara Merdeka</i>	71
4.13	Iklan kampanye PAN dalam surat kabar <i>Suara Merdeka</i>	72
4.14	Iklan lembaga non-parpol dari <i>Suara Merdeka</i> terkait informasi persyaratan dan tanggal pemilihan umum	74
4.15	Iklan lembaga non-parpol dari <i>Suara Merdeka</i> terkait pesan moral dalam kegiatan Pemilu	75

4.16	Iklan lembaga non-parpol berisi himbauan untuk turut serta dalam Pemilu yang demokrasi	76
4.17	Iklan politik dari LSM terkait ajakan dalam partisipasi Pemilu jujur	77
4.18	Iklan acara dialog interaktif antara parpol dan media massa	78
4.19	Tabel Daftar penghitungan suara Pemilu 1999 di Jawa Tengah	81
4.20	Tabel perolehan kursi sementara DPR dan DPR dari Jawa Tengah	82
4.21	Berita mengenai PPI yang menunggu keputusan panwas untuk Pemilu ulang	82
4.22	Berita mengenai kondisi politik saat Pemilu 1999	83

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang “Penggunaan Surat Kabar *Suara Merdeka* Sebagai Media Komunikasi Politik pada Pemilu 1999”. Iklan politik merupakan suatu bentuk pemasaran politik yang dibuat dengan tujuan menaikkan popularitas yang diiklankan. Iklan politik adalah salah satu bagian dari komunikasi politik dan juga tidak akan lepas dari komunikasi massa. Sarana yang digunakan dalam komunikasi massa adalah media massa yang salah satunya adalah surat kabar.

Surat kabar *Suara Merdeka* terbit sejak 11 Febuari 1950 dan dalam perkembangannya perusahaan pers tersebut selalu meningkat. Tingginya oplah *Suara Merdeka* di era 1990-an menjadikan koran tersebut mendominasi industri surat kabar di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang. Eksistensinya di masa itu menjadikan partai politik memilih melakukan komunikasi massa dalam *Suara Merdeka*.

Bentuk komunikasi politik dalam Pemilu 1997 dan 1999 memiliki perbedaan yang signifikan. Pemilu 1997 tidak muncul iklan politik dalam surat kabar *Suara Merdeka*, komunikasi politik parpol hanya melalui advertorial. Hal ini memberikan peluang partai pemerintah yang menduduki masa itu, yaitu Golkar, untuk tetap melakukan komunikasi politik agar tetap bertahan seperti posisi pada Pemilu sebelumnya. Berbeda dengan Pemilu pertama pascareformasi yaitu pada tahun 1999, dilatarbelakangi munculnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang membawa kebebasan pers. Munculnya undang-undang ini berdampak pada masa kampanye Pemilu 1999, dalam Surat kabar *Suara Merdeka* mulai di isi dengan iklan-iklan poltik.

Perolehan suara Golkar dalam Pemilu Orde Baru di Kota Semarang selalu jauh lebih unggul dibandingkan partai rivalnya. Akan tetapi, dengan munculnya iklan politik dalam surat kabar *Suara Merdeka* pada Pemilu 1999, menjadikan PDIP yang baru pertama kali mengikuti Pemilu dapat memperoleh suara tertinggi di Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan iklan politik memiliki efektivitas pada perolehan suara Pemilu, seperti memengaruhi pemikiran masyarakat pembaca terhadap partai pilihannya.

ABSTRACT

This under graduate thesis is discussing about “The Use of Suara Merdeka Newspaper as Communication Media in the 1999 Election”. Political advertising is a form of political marketing which is made to increase the popularity. Political advertising is a part of political communication related to mass communication. The medium of mass communication is mass media, one of them is newspaper.

Suara Merdeka which has been published since 11st February 1950 and its development is always increasing. The high circulation of Suara Merdeka in the 1990s made the newspaper dominating the newspaper industry in Central Java, especially in Semarang. Its existence at that time made political parties choose to make mass communication in Suara Merdeka.

The political communication form in the 1997 and 1999 elections has significant difference. In 1997 election, there is no political advertising in Suara Merdeka, there is only advertorial of political advertising. This thing provided an opportunity for the government party that occupied the period, Golkar, to continue to carry out political communication to stay as in the previous election place. Different with the first post reformation election in 1999, based on “Undang-Undang No. 40 Tahun 1999” about press, which brought freedom to press. The emergence of this law had an impact on the 1999 election campaign period which the political advertising began to show in Suara Merdeka.

The vote of Golkar in the New Order election in Semarang had been always higher than its rivals. However, with the appearance of political advertising in Suara Merdeka in 1999 election, made PDIP which was first time participating in the election can get the highest vote in Semarang. It shows that the use of political advertising has an effectiveness in the electoral vote, as it influences the thinking of the readers towards the party of their choice.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pers sebagai salah satu subsistem komunikasi politik mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan pada era Orde Baru. Kebebasan pers terbatas dengan dikeluarkannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP), yang sewaktu-waktu bila dianggap merugikan penguasa dapat dicabut dengan mudah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto setiap melakukan pembredelan mengatasnamakan sebagai Demokrasi Pancasila, akibatnya Demokrasi Pancasila dikritik sebagai mekanisme kekuasaan yang tidak demokratis. Asas Demokrasi Pancasila yaitu: *Pertama*, kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat-alat dari *expression* seperti dikemukakan oleh negara-negara sosialis. *Kedua*, pers tidak mengundang lembaga sensor preventif. *Ketiga*, kebebasan bukanlah tidak terbatas, tidak mutlak dan bukanlah tidak bersyarat sifatnya. *Keempat*, kebebasan merupakan suatu bentuk yang memiliki batas-batas tertentu, dengan syarat-syarat limitatif dan demokrasi. *Kelima*, kemerdekaan pers dibimbing oleh rasa tanggung jawab dan membawa kewajiban-kewajiban untuk pers yang disesuaikan dengan tugas pers sebagai kritik adalah negatif dalam karakternya juga positif sifatnya.¹

Tidak hanya media yang mendapatkan keterbasan kebebasannya pada masa Orde Baru, yang notabene Golkar mendominasi kekuasaan di Republik Indonesia, warga sipil juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh Golongan Karya (Golkar) yang ditopang oleh pandangan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang mampu masuk ke celah-celah kehidupan sosial politik dan ekonomi. ABRI pada penghujung masa pemerintahan Orde Baru tampil sebagai

¹Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1987), hlm. 155.

golongan politik yang mempunyai pengaruh kuat di luar fungsi utamanya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.²

Golkar selalu sukses meraup suara tertinggi selama penyelenggaraan Pemilu sebelum tahun 1999, yaitu pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992. Kesuksesan ini bertambah setelah pada Pemilu 1997, Golkar mampu memantapkan kembali kursi kepemimpinan di Indonesia. Akan tetapi pada tahun 1999, kekuasaan selama 32 tahun ini harus tumbang dan memaksa pemerintah penggantinya menggelar Pemilu yang lebih jujur dan adil.³

Pemilu 1997 di Kota Semarang diawali dengan kampanye besar-besaran yang digelar Golkar di lapangan PRPP Tawangmas. Mbak Tutut, putri sulung Presiden Soeharto tampil dalam orasi di ruang publik bersama dengan beberapa petinggi partai berlambang pohon beringin ini.⁴ Sementara pada pelaksanaan Pemilu 1999, giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tampil sebagai peraih suara tertinggi di Kota Semarang. Keberhasilan mengungguli Golkar yang berkuasa selama tiga dekade lebih ini, menjadi bukti perubahan dinamika perpolitikan di Indonesia, Jawa Tengah, dan di Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi.

Pada Pemilu 1999, yang berlangsung pada era Reformasi, penggunaan iklan-iklan politik semakin masif bertebaran di berbagai media massa khususnya surat kabar. Tidak terkecuali yang terjadi di Kota Semarang melalui surat kabar tertuanya *Suara Merdeka*. Surat kabar yang terbit sejak 11 Februari 1950 ini menjadi salah satu corong kampanye maupun pemasaran politik ideal pada penghujung abad ke-20 ini.

Atas dasar posisi, peran, dan fungsi-fungsi politik dari partai politik pada masa tersebut, maka penulis hendak menyoroiti penggunaan iklan-iklan politik

²Harsutejo, *Kamus Kejahatan Orba Cinta Tanah Air dan Bangsa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 8-9.

³Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 663.

⁴“Jateng-Jatim Prioritas Kenaikan Suara Golkar: Mbak Tutut Awali Kampanye di PRPP, Besar Berkat Dukungan Warga NU”, *Suara Merdeka*, 28 April 1997, hlm. 1.

pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar pada tahun 1999. Iklan-iklan yang bertebaran dan tercetak dalam media massa surat kabar menjadi sumber utama dalam skripsi ini. Iklan-iklan politik sebagai bagian dari kampanye digunakan untuk menarik minat warga pemilih, seakan-akan menjadi media ampuh untuk memengaruhi perolehan suara partai penguasa.

Oleh sebab itu, karena belum adanya karya historiografi yang sesuai dengan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis ingin menganalisis lebih mendalam penggunaan iklan-iklan politik dalam surat kabar *Suara Merdeka* di Kota Semarang pada peristiwa penyelenggaraan Pemilu 1999. Pemilu ini dipilih berdasarkan keunikannya, karena selain waktu penyelenggaraannya yang berdekatan hanya berselang dua tahun dari Pemilu 1997, dua Pemilu ini juga menjadi batas transisi kekuasaan dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah menemukan bagaimana simbiosis-mutualisme antara media dengan partai politik yang menggunakan media massa sebagai sarana dalam meraih suara pemilih.

Untuk memandu menjawab permasalahan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999 dalam surat kabar *Suara Merdeka*?
2. Peraturan apa saja yang menjadi landasan komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999?
3. Bagaimana dampak komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999 terhadap hasil perolehan suara?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan sejarah akan menjadi lebih terarah jika dilengkapi dengan perangkat pembatas, baik temporal, spasial, maupun keilmuan, sehingga sejarawan mampu memberikan batasan narasi ke dalam satu unit kesatuan yang jelas.⁵ Skripsi ini

⁵Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 130.

akan membatasi secara temporal narasi komunikasi politik mulai saat kampanye Pemilu 1997 yang dimuat dalam surat kabar *Suara Merdeka*. Selain itu, pada tahun 1998 merupakan menyusutnya masa Orde Baru ditandai dengan turunnya jabatan Presiden Soeharto. Tahun ini merupakan awal mula terciptanya negara demokrasi sebenarnya.

Sementara batas temporal akhir hingga pengumuman hasil perhitungan suara Pemilu 1999 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pada 26 Juli 1999. Puncaknya beberapa partai besar menggelar syukuran atas hasil Pemilu 1999. Salah satu partai pemenang Pemilu pada tahun tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “PDIP gelar tahlilan di kantor Pantai Marhaen”⁶ Pada berita tersebut terlihat perubahan kekuasaan yang sangat signifikan, di mana awalnya Golkar mendominasi hasil perolehan suara pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 1999 justru PDIP yang berhasil memenangkan Pemilu. Pemilihan batas temporal ini tidak lepas dari pandangan penulis yang ingin mencoba menganalisis dinamika penggunaan iklan-iklan politik selama dua Pemilu di Kota Semarang yang menjadi ujung kekuasaan Orde Baru dan awal era Reformasi di Indonesia.

Secara spasial, penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan iklan-iklan politik Pemilu 1999 yang dimuat oleh surat kabar *Suara Merdeka* dan beredar di Jawa Tengah. Pemilihan kota ini tidak lepas dari posisi dan peran Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan posisinya yang strategis ini, tentu akan banyak penggunaan iklan-iklan politik yang bertebaran di seluruh sudut kota dalam berbagai bentuk.

Selain pembatasan temporal dan spasial, penelitian ini juga memiliki batasan secara keilmuan. Penelitian mengenai komunikasi politik dapat dikategorikan ke dalam sejarah politik. Akan tetapi, sejarah politik yang akan dinarasikan dalam skripsi ini adalah sejarah politik gaya baru menurut Sartono Kartodirdjo. Sejarah politik gaya baru akan memaparkan narasi yang tidak selalu

⁶“PDI Perjuangan Tahlilan di Panti Marhaen”, *Suara Merdeka*, 28 Juli 1999, hlm. 2.

berbau perilaku penguasa, peperangan, maupun perebutan hegemoni kekuasaan belaka.⁷ Sejarah politik ini akan menampilkan narasi lain yang menempatkan para aktor politiknya yang bergerak menggunakan berbagai macam media informasi guna merebut simpati publik sesuai dengan kebijakan partai politik di Jawa Tengah dalam meluaskan pengaruh dan menarik simpati masyarakat. Politik di sini diartikan sebagai cara partai politik meraup dukungan masyarakat melalui berbagai media, salah satunya adalah media cetak. Skripsi ini berfokus pada komunikasi politik yang dimuat oleh surat kabar *Suara Merdeka* pada era menjelang Reformasi dan pascareformasi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

Pertama, mengetahui isi dan bentuk komunikasi politik, serta dapat menjelaskan perbedaan bentuk komunikasi politik pada Pemilu 1997 dan 1999 yang terdapat pada surat kabar *Suara Merdeka*. *Kedua*, dapat menjelaskan peraturan-peraturan yang mengatur tentang komunikasi politik dalam media massa saat Pemilu 1997 dan 1999. *Ketiga*, mendeskripsikan dampak penggunaan komunikasi politik dalam media massa terhadap hasil perolehan suara yang didapatkan oleh partai-partai politik peserta Pemilu 1997 dan 1999.

D. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai Kota Semarang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dalam skripsi ini tidak semua studi itu akan dibahas dalam bagian ini. Akan tetapi, pembahasan hanya berfokus pada beberapa studi penting dan relevan mengenai dinamika kepartaian yang terjadi di tingkat nasional

⁷Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 149-150.

maupun lokal. Sebagian besar studi-studi ini ditulis oleh akademisi di bidang politik, sementara sisanya ditulis oleh sejarawan akademisi.

Tinjauan pustaka yang pertama dalam bentuk buku saku berjudul *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi* karya Ariobimo Nusantara, Masri Sareb Putra, dan Sudarmanto. Buku saku berukuran kecil ini menarasikan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai media sezaman. Surat kabar dan gerakan demonstrasi yang dinarasikan secara terpisah-pisah oleh para penulis sebagai ungkapan memori dan fakta aktual peristiwa tumbangnya dua rezim besar di Indonesia, digambarkan begitu padat, jelas, dan ringkas. Ketiga penulis ini mampu menggambarkan situasi Indonesia sejak era Orde Lama hingga masa awal Reformasi di Indonesia.

Peran mahasiswa yang begitu aktif mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan pada masa itu menjadi titik fokus pada buku ini. Mahasiswa menunjukkan kapasitasnya sebagai agen kontrol sosial dengan turut serta menyuarakan aspirasi rakyat yang tertindas. Relevansi buku ini terletak pada penggunaan sumber penulisan dari bahan-bahan dokumentasi di berbagai koran lokal, nasional, maupun internasional yang disarikan dalam rangkuman narasi menuju Reformasi yang sangat komprehensif.

Surat Kabar dalam buku ini memainkan peran penting untuk menyadarkan rakyat Indonesia pada masa itu. Surat kabar menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan kekecewaan, sekaligus kerinduan akan pemerintahan baru yang bersih dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Akan tetapi, di balik sisi keringkasan dan kesingkatannya dalam bercerita dan berbagi pengalaman menuju Reformasi yang dikemas dengan sangat efisien tersebut, buku ini menyimpan catatan kelemahan.

Sudut pandang mahasiswa yang hanya melihat permasalahan menuju Reformasi Indonesia, sebagian besar hanya berisi hujatan terhadap kekuasaan Orde Baru yang terlihat despotik. Meskipun seharusnya, bila menggunakan sumber penulisan dari beragam koran, tentunya informasi yang dibagikan bisa

beragam, sehingga pembaca memahami duduk persoalan penyebab Reformasi lebih terperinci dan komprehensif.⁸

Pustaka kedua merupakan buku berjudul *Pers di Masa Orde Baru* karya David T Hill.⁹ Dalam buku tersebut dijelaskan sejarah latar belakang pers di Indonesia. Kajian dalam buku tersebut lebih membahas mengenai perkembangan pers di masa Orde Baru, dipusatkan pada periode pemerintah menjalankan aksi antipers. Pada masa Orde Baru, peran media dialihfungsikan sebagai sarana propaganda pemerintah untuk menggerakkan pembangunan nasional. Pengawasan dari penguasa di masa itu sangat memengaruhi media pers, sehingga hal ini berdampak pada kehidupan pers yang seharusnya memiliki kebebasan yang sudah ada dalam peraturan, namun realitanya digunakan sebagai ruang gelar kekuasaan oleh struktur yang mendominasi masa itu. Permasalahan pada masa Orde Baru dikaji mengenai upaya yang dilakukan melalui kontrol legalisasi dan struktur korporasi untuk melindungi media cetak. Buku tersebut juga menjelaskan kebijakan yang relevan dari Departemen Penerangan Republik Indonesia maupun organisasi profesional hingga semua aspek yang bersangkutan dengan pers.

Relevansi penulis menggunakan buku ini adalah guna mengamati kondisi pers pada masa Orde Baru. Pada tahun 1969, terdapat aksi pembredelan pers, hingga pada tahun 1970 merupakan awal tumbuhnya pemberitaan pers yang simpatik pada oposisi pemerintahan masa itu. Selain itu, kajian dalam buku tersebut dapat dijadikan perbandingan mengenai isi berita yang berdampak pada pembredelan.

Perbedaan buku ini dengan skripsi penulis adalah buku ini mengkaji tentang pers nasional, menjelaskan mengenai kejadian-kejadian yang dialami media pada masa Orde Baru, namun buku tersebut tidak melakukan pembahasan tentang isi ataupun bentuk berita pada pers masa itu.

⁸Ariobimo Nusantara, Masri Sareb Putra, dan Sudarmanto, *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi* (Jakarta: Grasindo, 1998).

⁹David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

Pustaka ketiga berasal dari skripsi sejarah karya Hendra Wibawa yang berjudul “Relasi Pers Mahasiswa dan Pemerintah di Indonesia: Studi Kasus Pemberitaan Surat Kabar Harian KAMI tahun 1966-1974”.¹⁰ Skripsi tersebut mengkaji lahirnya surat kabar KAMI yang sebelumnya dijelaskan juga mengenai berdirinya kesatuan aksi mahasiswa Indonesia dan munculnya Gerakan Pers Mahasiswa hingga menjelaskan pembredelan surat kabar KAMI dan pers mahasiswa kembali ke kampus. Diperlukannya skripsi ini sebagai tinjauan pustaka karena adanya pembahasan yang detail mengenai surat kabar harian KAMI pada masa pemerintahan Orde Baru, diperjelas dengan bahasan pemberitaan tentang praktek politik pemerintahan Orde Baru tahun 1969-1971 yang mengerucut pada Pemilu 1971.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pers mahasiswa terutama surat kabar KAMI diberi kedudukan pemerintah Orde Baru dengan posisi pendukung kekuasaan. Secara sadar, surat kabar KAMI memainkan perannya untuk melegitimasi kekuasaan dan tegaknya pemerintahan Orde Baru. Tiga tingkatan peran yang dijalankan oleh KAMI adalah politik, ideologi, dan kritik.

Relevansi penulis menggunakan skripsi adalah mengamati bahasan pemberitaan yang ada dalam penulisan tersebut. Terutama pada bahasan yang mengenai praktik politik hingga Pemilu 1971. Selain itu penulis, mengamati bagaimana jalinan rekanan antara KAMI dengan pemerintahan masa itu yang memberikan kedudukan lebih untuk media tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi ini tidak menjelaskan jenis berita yang ada dalam perannya.

Tinjauan pustaka keempat adalah skripsi berjudul “Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Gerakan Pers Menuju Reformasi Tahun 1994-1999” karya Ahmad Yusuf.¹¹ Skripsi ini memberikan informasi mengenai kondisi pers pada masa Orde Baru, otoritarianisme pemerintah Orde Baru dan bentuk-bentuk tekanan terhadap pers. Selain itu dibahas pula lahirnya Aliansi Jurnalis

¹⁰ ?????

¹¹ Ahmad Yusuf, “ Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Gerakan Pers Menuju Reformasi Tahun 1994-1999” (Skripsi pada Program Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2005).

Independen (AJI) yang menjadi wadah bagi pegiat pers, komunitas seniman dan wartawan untuk melawan pemerintah. Skripsi tersebut membahas pula mengenai pembredelan tiga media pers oleh pemerintah, yaitu *Tempo*, *Editor* dan *Detik*. Pembredelan tersebut menjadi salah satu faktor lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mampu memperjuangkan kebebasan pers dengan strategi media bawah tanah, media ini membentuk pergerakan sosial yang memunculkan isu dan cara melihat isu yang berbeda dari isu yang terdapat di lingkungan media umum.

Relevansi penulis menggunakan skripsi ini adalah pengamatan terhadap isi yang sebagian dapat digunakan untuk pedoman terutama guna klarifikasi data yang digunakan oleh penulis. Dalam kajian surat kabar *Suara Merdeka*, dapat dikaitkan antara AJI, yang merupakan organisasi pers independen berpengaruh pada masa itu, dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang merupakan organisasi wartawan yang dibentuk pemerintah, yang bertekad untuk membubarkan organisasi tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan skripsi ini lebih pada organisasi yang ada pada Reformasi, sedangkan penulis melakukan pembahasan bentuk publikasi yang dilakukan insan pers pada masa Reformasi.

Tinjauan kelima adalah skripsi dengan judul “*Harian Suara Karya 1971-2005: Dari Surat Kabar Partai Menjadi Surat Kabar Independen*” karya Anisa Nur Sadrina.¹² Skripsi ini membahas dominasi Pemerintah Orde Baru terhadap dunia pers, pembredelan beberapa media pers, faktor-faktor penghambat kebebasan pers. Dibahas pula lahirnya *Harian Suara Karya*, pergeseran dan penyebab pergeseran *Harian Suara Karya*. Salah satu penyebab pergeseran *Harian Suara Karya* adalah jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Perubahan ini menyebabkan *Harian Suara Karya* melakukan transformasi dari media partai menjadi media independen agar tidak ditinggal oleh pembaca.

¹²Anisa Nur Sadrina, “*Harian Suara Karya 1971-2005: Dari Surat Kabar Partai Menjadi Surat Kabar Independen*” (Skripsi pada Program Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2018).

Relevansi penulis menggunakan skripsi ini adalah mengamati bahasan skripsi tersebut guna interpretasi dengan skripsi penulis, terutama dalam bahasan potret kehidupan media massa era Orde Baru dan pergeseran substansi berita *Harian Suara Karya* pascareformasi, sehingga dapat diinterpretasikan dengan skripsi penulis mengenai adakah transisi substansi pemberitaan yang dimuat oleh *Suara Merdeka*. Perbedaan skripsi ini adalah pembahasan yang dikaji mengenai perubahan surat kabar yang menjadi independen, sedangkan penulis melakukan pembahasan pada iklan politik yang dimuat dalam surat kabar pada masa Reformasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah. Menurut Garraghan, metode sejarah adalah suatu kumpulan sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu secara efektif, empat tahapan berupa pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah (heuristik), menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis (kritik), dan menyajikan suatu hasil sintese (interpretasi) yang pada umumnya dalam bentuk tulisan dari hasil-hasil yang dicapai (historiografi).¹³

Pengumpulan sumber sejarah atau heuristik adalah suatu teknik untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu.¹⁴ Jejak-jejak masa lalu menurut Suhartono W. Pranoto bisa dibagi dalam empat jenis, yaitu sumber tertulis (dokumen), sumber lisan (oral), benda tinggalan (artefak), dan sumber kuantitatif (penghitungan).¹⁵ Sumber tertulis yang penulis gunakan dalam skripsi ini berasal dari satu sumber, yaitu surat kabar *Suara Merdeka* yang terbit sejak 1950 di Kota Semarang. Surat kabar merupakan bahan dokumenter yang berharga, sebab dari segi substantifnya

¹³Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Semarang: UNNES Press, 2007), hlm. 8-9.

¹⁴G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

¹⁵Suharto W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 151.

mencakup berbagai segi kehidupan sosial yang dapat menggambarkan kehidupan masyarakat secara utuh dari berbagai sudut pandang.¹⁶ Oleh sebab itu, penulis melakukan penelusuran berita, khususnya komunikasi politik yang dimuat oleh *Suara Merdeka* pada kurun 1997-1999.

Sumber tertulis yang sudah dijabarkan di atas perlu dilengkapi dengan sumber lisan berupa hasil wawancara. Sumber lisan digunakan untuk mengungkapkan pengalaman hidup beberapa wartawan yang melihat pelaksanaan Pemilu 1997-1999. Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya adalah pengujian sumber. Kuntowijoyo memiliki nama lain untuk menyebut tahap ini, yaitu tahap verifikasi yang isinya sama berupa kritik ekstern dan kritik intern.¹⁷ Kritik ekstern dilakukan untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber, sementara kritik intern untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam dokumen tersebut dapat dipercaya. Surat kabar *Suara Merdeka* menjadi koran dengan oplah penjualan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga sangat kredibel digunakan sebagai sumber utama penulisan skripsi ini. Sedangkan sumber lisan yang diperoleh melalui berbagai informan dapat dikatakan kredibel karena para informan mengalami dan mengamati situasi Pemilu 1997 dan Pemilu 1999.

Tahap ketiga adalah kegiatan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber baik ekstern maupun intern. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan penggunaan komunikasi politik Pemilu 1997 dan Pemilu 1999 dalam surat kabar *Suara Merdeka* disintesis dan saling dikait-kaitkan antara satu fakta dengan fakta lainnya.¹⁸ Dengan demikian, dapat disusun narasi yang utuh atas penggunaan iklan-iklan politik yang bertebaran selama masa kampanye hingga penghitungan suara akhir di Kota Semarang.

¹⁶Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm. 108.

¹⁷Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2005), hlm. 100-101.

¹⁸Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*, (Semarang: UNNES Press, 2007), hlm. 73.

Tahap keempat adalah penulisan sejarah yang menurut sejarawan Louis Gottschalk merupakan rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan data-data yang diperoleh.¹⁹ Rekonstruksi imajinatif ini dilakukan terhadap fakta-fakta yang sudah disintesis pada tahapan sebelumnya, kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

F. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan politik dengan menggunakan pengaruh media massa sebagai sarannya, menjadi sebuah kelaziman pada era Orde Baru. Pemerintah yang berkuasa menggunakan kendalinya atas informasi dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaannya yang sah. Seluruh informasi yang dihasilkan oleh penguasa disusun sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan masyarakat sebagai pendukungnya dan memperkuat basis kekuasaannya.²⁰ Keberadaan media massa dalam bentuk apa pun pada era Orde Baru, khususnya penggunaan surat kabar dan beberapa media elektronik seperti televisi dan radio untuk melanggengkan dan merekayasa pelaksanaan pemilihan umum. Media massa menjadi corong kekuasaan penguasa Orde Baru untuk memanipulasi, mempromosikan, bahkan menarik simpati rakyat.²¹ Penggunaan iklan-iklan politik ini menjadi bagian penting dari komunikasi politik dalam konsepsi pemasaran politik.

Pemasaran politik adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditujukan kepada sasaran tertentu dengan tujuan

¹⁹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

²⁰Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 152-153.

²¹Ishadi S. K., *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 214-215.

mengubah wawasan, sikap, dan perilaku calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi. Untuk menggerakkan pemasaran politik agar lebih efektif, para aktor-aktor politik harus memperhatikan setidaknya empat elemen utama, yaitu produk, tempat, harga, dan promosi.²²

Produk sesuai dengan konsepsi pemasaran politik tentu berkaitan dengan partai baik logo partai, visi dan misi, program, dan kandidat yang diajukan partai. Elemen tempat juga dalam konsepsi pemasaran politik bisa diasosiasikan dengan ruang publik. Ruang publik ini bisa dalam berbagai bentuk, antara lain media massa baik televisi, radio, dan surat kabar, serta papan reklame, dan internet. Begitu pula dengan harga, bila dikonsepsikan sama dengan penjelasan produk dan tempat dalam kajian pemasaran politik, harga sebuah partai besar lebih sulit dimasuki oleh para calon yang ingin maju sebagai kontestan, dibandingkan partai-partai kecil yang digolongkan sebagai partai gurem.²³ Sementara itu, promosi dalam kajian pemasaran politik lebih sering disebut kampanye, guna menarik perhatian para pemilih pada Pemilu nantinya.²⁴

Pemasaran politik dalam bentuk kampanye ini, agar berjalan efektif dan benar-benar mampu menarik para pemilih dalam Pemilu, secara konkret banyak diwujudkan dalam iklan-iklan politik. Iklan politik menurut Bolland merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan untuk membeli tempat atau ruang dalam menyampaikan pesan-pesan politik dalam media. Media yang biasa digunakan iklan, antara lain bioskop, *billboard* (baliho), surat kabar, radio, dan televisi.²⁵

²²Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Edisi Revisi 2011 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 277-279.

²³Partai gurem diartikan partai kecil yang memiliki sedikit pemilih dan tingkat popularitasnya rendah. Baca gurem dalam kamus bahasa Indonesia disamakan dengan penyebutan guram yang berarti suram, muram, atau tidak bercahaya. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 330.

²⁴Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, hlm. 278-279.

²⁵Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Edisi Revisi 2011 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 345.

Menurut Baukus, iklan-iklan politik untuk memengaruhi para pemilih ini dapat dibagi ke dalam empat macam, yaitu *pertama*, iklan serangan yang ditujukan untuk mendiskreditkan lawan. *Kedua*, iklan argumen yang memperlihatkan kemampuan para kandidat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. *Ketiga*, iklan ID yang memberi pemahaman mengenai siapa sang kandidat kepada para pemilih. Keempat, iklan resolusi yang menempatkan kandidat menyimpulkan pemikiran mereka untuk para pemilih.²⁶

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan komunikasi politik dalam media surat kabar. Pemberitaan surat kabar secara umum di Indonesia saat proses Pemilu berjalan hingga hari pemungutan suara berakhir, setidaknya memuat sepuluh konten pemberitaan yang sering ditampilkan dalam media cetak. Kesepuluh konten itu antara lain penundaan pemilihan, pemilihan langsung, publikasi calon, akomodasi usulan masyarakat, debat terbuka calon, dikotomi sipil militer, dikotomi putra daerah dan bukan putra daerah, pemboikotan pemilihan, penggunaan hati nurani dalam memilih, dan politik uang (*money politics*).²⁷

Peran dan posisi surat kabar dalam menampilkan iklan-iklan politik sangat penting, karena surat kabar bertindak pula sebagai mediator yang menyampaikan berbagai pesan politik dari luar dirinya, sekaligus sebagai pengirim pesan politik yang sengaja dibuat, baik oleh pemilik surat kabar, ataupun wartawan yang disampaikan kepada khalayak luas.²⁸ Oleh sebab itu, secara garis besar, iklan-iklan politik tersebut ditujukan untuk menjual dan membentuk merek, baik kandidat maupun partai politiknya, serta mencitrakan kepada konsumen atau pemilih bahwa kandidat yang diiklankan adalah yang terbaik dibanding para

²⁶Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, hlm. 346.

²⁷Mahi M Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik dalam Pilkada Langsung* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 159.

²⁸Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 97.

saingannya.²⁹ Iklan dapat digolongkan berdasarkan tujuan, ruang, dan sifatnya. Dalam penggunaan iklan politik berdasarkan sifat dikategorikan iklan non-niaga yang berarti iklan yang dibuat untuk memengaruhi masyarakat agar mempunyai rasa simpati atau memberi dukungan atas suatu permasalahan aspek yang diiklankan. Berdasarkan tujuan dikategorikan iklan pengumuman adalah iklan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan, penerangan, atau pengumuman kepada masyarakat tentang suatu kabar atau peristiwa. Adapun iklan berdasarkan ruang, dimuat sesuai kebijakan antara pelaku politik dan media surat kabar tersebut, akan menggunakan iklan display merupakan iklan yang lebih menonjolkan gambar dari pada tulisan dengan komposisi 70% gambar dan 30% tulisan, iklan advertorial merupakan iklan yang lebih banyak berisi tulisan ataupun menggunakan jenis ruang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembahasan yang utuh mengenai penggunaan iklan politik dalam Pemilu 1999 di surat kabar *Suara Merdeka* diharapkan dapat tercapai. Penjelasan terkait latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan ditempatkan dalam bab satu.

Sementara itu, untuk memberikan latar historis yang lebih lengkap seputar kehidupan partai politik di Kota Semarang pada dekade 1990-an, pada bab kedua skripsi ini akan mengulas hal-hal yang terkait dengan geografi, demografi, kondisi sosial ekonomi, dan sosial politik yang menyertai warga pemilik hak suara dalam Pemilu sebelum Reformasi.

²⁹Kathy Myers, "Memahami Para Pengiklan" dalam Howard Davis dan Paul Walton, *Bahasa, Citra, Media*, terjemahan Ikramullah Mahyuddin (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 230-231.

Pemilu 1997 hingga menuju keruntuhan Orde Baru menjadi pembahasan di bab ketiga. Bahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di bab kedua yang lebih spesifik, guna melihat dinamika kehidupan sosial politik warga Kota Semarang yang ditampilkan surat kabar *Suara Merdeka*. Dalam bab ini akan disorot mengenai berbagai kebijakan pemerintah kota, partai-partai politik, dan situasi-situasi menjelang pelaksanaan hari pencoblosan, hingga penghitungan total perolehan suara Pemilu 1997 di Kota Semarang. Difokuskan pada bagaimana bentuk komunikasi partai politik pada masa itu.

Di bab selanjutnya yaitu di bab keempat skripsi ini, penggunaan iklan politik dalam *Suara Merdeka* di Kota Semarang selama Pemilu berlangsung menjadi fokus bahasan di bab ini. Iklan-iklan politik ditampilkan sebagai bagian dari pemasaran politik, dalam berbagai bentuk dan kemasan yang kreatif dan inovatif. Semua itu tidak lepas dari salah satu bentuk komunikasi politik kepartaian dalam Pemilu 1997. Akan tetapi, dalam berkomunikasi antara partai dan para konstituennya tersebut, tentu tidak selamanya berjalan mulus, bahkan tidak jarang diwarnai berbagai konflik yang menyertai eksistensi dan perebutan suara konstituen pada setiap partai. Skripsi ini diakhiri dengan simpulan sebagai jawaban dari problematika yang diajukan di bab pertama.

Selanjutnya bab kelima adalah simpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pada bagian akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka dan daftar informan.